

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah (pemda) dituntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya konkrit yang dilakukan adalah dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Laporan yang dibuat Pemda meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia, 2010). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 24/2005).

Laporan keuangan yang disajikan diaudit terlebih dahulu serta dilampiri dengan pengungkapan (Wulandari, 2009). Pengungkapan yang terdapat dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*) (Suhardjanto dan yuliningtyas, 2011)

Pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan informasi yang wajib dikemukakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan badan otoriter. Pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang disajikan diluar item-item yang wajib diungkapkan sebagai tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap standar akuntansi pemerintahan diindonesia masih

rendah. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya pemerintah daerah yang mengungkapkan secara penuh, yaitu rata-rata sebesar 54,54% (Retnoningsih, 2009), 22% (Lesmana, 2010), 10,49% (suhardjanto dan yulianingtyas, 2011).

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang terdapat pada kabupaten/kota di Lampung, Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pasal 32 bahwa mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menyampaikan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban APBN/APBD yang disusun serta disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku, penyampaian bentuk dan isinya berupa laporan keuangan.

Saat ini masyarakat menginginkan sistem pengelolaan pemerintah pusat maupun daerah yang baik. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah daerah selalu berupaya melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mengelola keuangan pemerintah daerah yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pemerintah provinsi Lampung dan 12 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam pelaporan laporan keuangan tahun 2015 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 3 kabupaten lainnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam melaporkan laporan keuangannya. Pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh WTP yakni: Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Waykanan, Kota Bandar Lampung Dan Kota Metro. 3 Kabupaten lainnya yang mendapat opini WDP dalam pelaporannya yakni Lampung Timur, tanggamus, dan pesisir barat,” Kata Kepala Pemeriksa Laporan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Lampung, Dibandar Lampung, (20/07). (Antaralampung.com)

Penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh Lesmana (2010) melakukan penelitian dengan judul pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum menyajikan semua informasi yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan. Pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami informasi apa saja yang wajib diungkapkan dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dari hasil pengujian variabel yang dilakukan menunjukkan variabel karakteristik pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu penelitian Sumarjo (2010), dengan judul pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada studi kabupaten/kota di Indonesia, variabel yang digunakan adalah ukuran pemerintah, kemakmuran, ukuran legislative, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan daerah yang dilakukan dengan model regresi berganda yang menghasilkan variabel ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel kemakmuran (*wealth*) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang menguji pengaruh karakteristik terhadap pengungkapan di Indonesia telah banyak dilakukan, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yulianingtyas (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat, tahun penelitiannya serta peneliti menambahkan dua variabel baru yaitu tingkat kemakmuran daerah dan belanja daerah untuk mengetahui pengaruh hasil kedua variabel tersebut (Nugroho, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui **“pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah lampung, perumusan masalah pada penelitian ini: apakah terdapat pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung?.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Penelitian mengenai kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah khususnya di Lampung masih sedikit, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini. Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Ukuran daerah berpengaruh terhadap pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung?
2. Apakah tingkatan kemakmuran daerah berpengaruh terhadap pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung?
3. Apakah status daerah berpengaruh terhadap pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung?
4. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung?
5. Apakah jumlah satuan kerja perangkat daerah berpengaruh terhadap pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemakmuran daerah terhadap kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung
3. Untuk mengetahui pengaruh status daerah terhadap kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung.
4. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung.
5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah satuan kerja perangkat daerah terhadap kepatuhan pengungkapan pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat yang berguna antara lain sebagai berikut:

1. Pada Praktisi: hasil penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan dalam pengungkapan wajib pada laporan keuangan, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota di Lampung dalam mengungkap laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Pada akademik: hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis, yang berkaitan dengan penelitian di bidang sektor publik.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka sistematika penyusunannya yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas grand theory yang memuat landasan teori terdahulu, kerangka konseptuan, serta penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan deskripsi data, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, pembahasan.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dari hasil analisis data, dan saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**